



Konsep Pendidikan Demokrasi Perspektif Islam: Upaya Mendidik Generasi Menjadi Moderat dan Madani

Rafi Setiawan Berti Putra¹, Muhammad Alauddin Azhary²
Mochammad Rizky Adi Palefi³

Universitas Dinamika Surabaya

18410100114@dinamika.ac.id¹, 18410100143@dinamika.ac.id², 17510160026@dinamika.ac.id³

Abstrak: Politik yang diusung oleh Islam Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja) berprinsip (1) *at-tawasuth* (moderat, tengah-tengah) atau tak ekstrem, tak anti konsep bernegara memilih asas teokrasi (ketuhanan), aristokrasi (kerajaan), demokrasi (kerakyatan), atau lainnya. Kata kuncinya memenuhi aspek syura (musyawarah), *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (kesetaraan derajat), dan *al-hurriyyah* (kebebasan) dengan menjaga 5 prinsip dasar manusia (*al-usul al-khamsah*): menjaga jiwa (*hifdzu an-nafs*), agama (*hifdzu ad-din*), harta benda (*hifdzu al-mal*), identitas asal-usul/keturunan (*hifdzu an-nasl*), dan harga diri/kehormatan (*hifdzu al-'irdh*), (2) *at-tawazun*; seimbang dalam penerapan kaidah, teks, rasio, dan realitas, (3) *al-i'tidal* (tegak lurus) atau tak mudah terprovokasi, dan (4) *at-tasamuh* (menjunjung tinggi sikap toleran). Realisasi prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan inti ajaran Islam dalam kehidupan, termasuk berpolitik. Bila terealisasi, tidak perlu memaksakan diri dalam bentuk simbolisasi 'berwarna' kearab-araban atau kebarat-baratan. Negeri ini kaya dengan simbol, sehingga ragam simbol untuk diayomi negara yang merupakan esensi negara Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan itu anugerah Ilahi, kehendak Ilahi, sehingga saling menghormati di tengah perbedaan. Mengeratkan perbedaan untuk saling mengenal dan memahami sehingga saling menolong berbekal perilaku bijaksana. Hal ini menjadi titik tekan dari pendidikan demokrasi perspektif Islam.

Kata Kunci : Pendidikan Demokrasi, Islam Moderat, Madani.

Abstract: Politics promoted by Islam Ahlu as-Sunnah wa al-Jamaah (Aswaja) has the principles of (1) *at-tawasuth* (moderate, middle) or not extreme, not anti-state concept, choosing theocracy (divinity), aristocracy (kingdom), democracy (populist), or others. The key words fulfill aspects of shura (deliberation), *al-'adl* (justice), *al-musawah* (equality of degrees), and *al-hurriyyah* (freedom) by maintaining 5 basic human principles (*al-usul al-khamsah*): guarding the soul (*hifdzu an-nafs*), religion (*hifdzu ad-din*), property (*hifdzu al-mal*), identity of origin/offspring (*hifdzu an-nasl*), and self-esteem/honor (*hifdzu al-'irdh*), (2) *at-tawazun*; balanced in the application of rules, texts, ratios, and reality, (3) *al-i'tidal* (perpendicular) or not easily provoked, and (4) *at-tasamuh* (upholding tolerance). The realization of these principles is essentially the core of Islamic teachings in life, including politics. If it is realized, there is no need to force yourself in the form of 'colored' Arabic or westernized symbolism. This country is rich in symbols, so the various symbols for the protection of the state are the essence of the state of Bhinneka Tunggal Ika. Differences are divine gifts, divine wills, so that we respect each other amid differences. Strengthening differences to know and understand each other so that they can help each other armed with wise behavior. This has become a pressing point for democratic education from an Islamic perspective.

Keywords: Education, Democracy, Islam, Moderat, Madani

A. PENDAHULUAN

Demokrasi dalam islam yang menerapkan prinsip-prinsip islam ke dalam kebijakan ruang publik. Demokrasi bukan hanya untuk wacana, tetapi juga simbol dari sebuah pemerintahan. Wacana demokrasi dan Islam sering diwarnai pro dan kontra, wacana tersebut selalu menarik untuk diperbincangkan meskipun umat Islam sebenarnya tidak pernah sepakat dengan maknanya.



Hal ini tampak dari panggung politik kontemporer, semakin banyak gerakan-gerakan Islam melibatkan diri dalam isu demokratisasi dan civil society. Hubungan antara demokrasi dan Islam saat ini begitu kompleks. Sistem demokrasi Barat dalam perkembangannya menjadi pilihan negara-negara berkembang karena diyakini sebagai sistem yang menjunjung tinggi keadilan dan hak asasi manusia.

Meskipun demokrasi telah menjadi simbol sejak 1980-an, para penulis Barat dengan sengaja menjauhkan dunia Islam dari tulisan-tulisan demokratis karena, dalam pandangan Harat, Islam tidak memiliki prospek demokrasi atau pengalaman demokrasi yang memadai. Menurut Mun'im A. Sirry di halaman pendahuluan, ada tiga hal yang mempengaruhi dunia Barat. Pertama, pemahaman doktrinal menghambat praktik demokrasi. Teori ini dikemukakan oleh Elie Kedourie, “gagasan demokrasi masih cukup asing dalam pemikiran Islam”, dan hal ini dikarenakan sebagian besar umat Islam cenderung memahami demokrasi sebagai sesuatu yang bertentangan dengan Islam.

Oleh karena itu, yang dibutuhkan sekarang adalah liberalisasi pemahaman agama, termasuk pencarian konsensus dengan teori-teori modern tentang demokrasi, kebebasan, dll. Kedua, masalah budaya. Faktanya, sejak paruh pertama abad kedua puluh, negara-negara Muslim telah mencoba dan gagal untuk melakukan demokratisasi. Karena warisan budaya masyarakat muslim sudah terbiasa dengan despotisme dan ketaatan pasif. Teori ini dikemukakan oleh Bernard Lewis (1994) dan Ajami (1998).

Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah penjelasan kultural mengapa demokrasi berkembang di Eropa, dan di dunia Islam, otoritarianisme yang berkembang sejauh ini. Isu budaya politik (civic culture) ditengarai bertanggung jawab karena sulitnya membangun demokrasi di negara-negara Muslim termasuk Indonesia. Ketiga, lambatnya pertumbuhan demokrasi di dunia Islam tidak ada hubungannya dengan teologi atau budaya, tetapi dengan sifat demokrasi itu sendiri. Membangun sentimen demokrasi membutuhkan ketulusan, kesabaran, dan yang paling penting, waktu. Esposito dan Voll (1996) termasuk di antara mereka yang optimis tentang masa depan demokrasi di dunia Islam.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini ialah menggunakan studi kepustakaan, di mana sumber utamanya ialah buku, jurnal dan dokumentasi yang sesuai topik kajian.



C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Demokrasi Barat

Asal usul demokrasi sebagai sistem politik kembali ke masa SM (BC) ketika orang-orang Yunani yang mendirikan negara-kota (city-states) mencoba Menjawab pertanyaan; bagaimana mengatur sistem politik untuk bertemu kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Sejak itu, demokrasi telah menjadi spesies Ada pasang surut dalam politik sepanjang sejarah manusia. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Selalu sebagai pemerintahan yang dihubungkan oleh rakyat atau oleh sistem, oleh rakyat atau oleh sistem Pemerintah diperintah oleh rakyat. Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan Berasal dari pemikiran para filosof Yunani seperti Socrates (399 SM) dan Plato (429-347 SM), Aristoteles (384-322 SM), Epix (342-271 SM).² demokrasi yunani Di zaman kuno itu disebut demokrasi langsung, di mana setiap warga negara berpartisipasi Aturan langsung, atau saya perintahkan kebijaksanaan Pemerintah negara. Demokrasi Yunani kuno di Athena yaitu demokrasi yang dipraktikkan di sebuah negara kota kecil, warganya, meskipun tidak seluruhnya, membuat keputusan politik langsung. Menurut Amin Rais, demokrasi dipraktekkan seperti di Athena dapat dianggap sebagai model kerja (model penerapan) demokrasi murni dan dari model Athena ini beberapa prinsip dapat diterapkan operasional. Demokrasi yang diterapkan di kota Athena adalah “demokrasi rakyat dimana” orang-orang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan termasuk dalam memecahkan masalah nasional. Selama implementasi model demokrasi, Athena, mendapat kritik dari para pemikir Yunani sendiri seperti Plato dan Aristoteles, Kedua tokoh filosof ini bukan pendukung demokrasi, tetapi kritisi terhadap demokrasi. Menurut Rais juga, Plato dan Aristoteles meranggapan berdasarkan pengamatan mereka pada praktek demokrasi di Athena, bahwa demorasi suatu bentuk sistem politik yang “berbahaya” dan tidak praktis. Plato mendambakan suatu aristokrasi yang dipimpin oleh seorang raja-filosuf dengan perhitungan, bahwa seorang raja sekaligus filosof memiliki berbagai kelebihan, keutamaan dan persepsinya jauh ke depan. Sedangkan Aristoteles yakin bahwa suatu pemerintahan Derdasarkan pilihan orang banyak dapat dipengaruhi oleh para demagog (penghasut) dan adiimya merosot menjadi kediktatoran. Menurut Aristoteles, demokrasi mudah meluncur ke arah tirani. Demokratia, pemerintahan oleh rakyat yang dicoba dikembangkan di Athena pada abad-abad kelima dan keempat Sebelum Masehi justeru dihindari oleh plato dan Aristoteles, dua orang penumbuh filsafat Barat.



2. Demokrasi ISLAM

Apakah ini benar-benar demokrasi? untuk menjawab pertanyaan ini Kita perlu mengacu pada dua pengertian demokrasi, pengertian demokrasi Cita-cita normatif dan pemahaman empiris tentang program. ada dua Pemahaman turunan pertama biasanya secara konseptual didefinisikan sebagai Bagus, ideal, lengkap. Dan pemahaman kedua lebih cocok untuk ini Praktik pelaksanaan demokrasi prosedural melihat demokrasi yaitu bagaimana nilai-nilai ideal tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial politik orang-orang.

Demokrasi dalam pengertian ini disebut demokrasi di permukaan Politik (prestasi politik). Demikian pula, pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi, Hal ini dapat dilihat dari dua perspektif, normatif dan empiris. di dataran Norma, banyak pakar politik Islam mempertanyakan nilai demokrasi dari perspektif sudut pandang Islam. Meskipun pada tingkat pengalamandalam praktek politik dan ketata negaraan di berbagai negeri Muslim. Kemajuan sebuah sistem bisa dilihat dari bagaimana rakyat melakukan demokrasi untuk menyelesaikan masalah dan memutuskan kepentingan umat. Dengan demokrasi kemaslahatan Bersama akan tercapai, islam salah satu agama yang memperjuangkan kesetaraan, demokrasi juga diperkuat dengan sunah nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menangani suatu masalah yang terjadi yang tidak ada dalam kitab Al-Quran. Maka hak para sahabat itu untuk memberi pendapat dan usulan di luar hal yang Nabi sendiri telah pasti akan melakukannya. emokrasi menurut Islam adalah ta'awun. Ta'awun adalah menyatakan adanya tuntutan untuk kerja sama demi kepentingan Tuhan dan kepentingan manusia sendiri. Sama halnya dalam nilai-nilai demokrasi, yakni menekankan kerja sama dan saling tolong menolong. Demokrasi menuntut suatu perubahan, sejalan dengan perkembangan kesadaran manusia yang selalu ingin mengadakan perbaikan.

3. Peran Demokrasi dalam islam

Pada tahun 1952-1958, Muhammad Natsir, yang merupakan ketua Masyumi, mendukung demokrasi, meskipun ia memiliki interpretasi yang berbeda. Dalam pandangannya, Islam adalah sistem demokrasi, dalam arti Islam menolak *despotisme*, *absolutisme*, dan *otoritarianisme*. Islam adalah kombinasi dari demokrasi dan despotisme. Artinya, segala urusan dalam pemerintahan Islam diputuskan melalui Musyawarah. Keputusan demokratis hanya berlaku untuk hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam hukum Syariah. Oleh karena itu, tidak ada keputusan demokratis mengenai masalah-masalah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti larangan perjudian dan perzinahan. Dalam hal ini, meski Natsir mendukung demokrasi, ia tetap mendukung kedaulatan Tuhan.



Jalaluddin Rahmat mendukung konsep demokrasi sebagai sistem politik yang didasarkan pada dua prinsip: pertama, partisipasi politik, dan kedua, hak asasi manusia. Pertama, masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik melalui pertemuan konsultatif. Yang kedua melindungi hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, kontrol dan persamaan di depan hukum. Lebih lanjut Rahmat menjelaskan bahwa sistem politik Islam tidak dapat dibandingkan dengan sistem demokrasi dalam dua pengertian: *Pertama*, demokrasi adalah sistem sekuler yang kedaulatannya ada di tangan rakyat, sedangkan dalam Islam kedaulatan ada di tangan Tuhan (kekuasaan). Mayoritas tidak dapat atau tidak akan mengubah hukum Syariah. *Kedua*, dalam praktiknya, suara rakyat dapat dimanipulasi melalui ancaman atau godaan, dan Islam adalah sistem unik yang mengembangkan prinsip musyawarah dan hak asasi manusia. Jadi kedua tokoh tersebut mendukung demokrasi, tetapi pada dasarnya mereka sepakat tentang kedaulatan Tuhan bukan kedaulatan rakyat.

Berbeda dengan dua tokoh di atas, Munawir Sjadzali menegaskan bahwa tidak dapat disangkal bahwa kedaulatan tertinggi adalah milik Tuhan secara alami, tetapi konsep kedaulatan rakyat tidak pernah ditafsirkan sebagai penolakan terhadap kedaulatan Tuhan. Bahkan secara historis, lanjutnya. Kedaulatan rakyat diperkenalkan untuk menentang kedaulatan monarki, yang memiliki kekuasaan absolut pada saat itu. Sementara itu, Nurchalish Madjid adalah pendukung setia demokrasi Barat. Baginya, umat Islam harus memilih ideologi demokrasi. Karena itu bukan hanya pertimbangan yang berprinsip, yaitu karena kami meyakini nilai-nilai demokrasi itu sah dan didukung oleh semangat ajaran Islam, tetapi juga karena berfungsi sebagai aturan politik yang terbuka. Aturan-aturan ini diperlukan agar sistem politik kita memiliki mekanisme untuk mengoreksi dari waktu ke waktu kesalahan dalam pelaksanaan pemerintahan dan penggunaan kekuasaan dari sudut pandang kepentingan rakyat dan ketentuan Konstitusi.

Amin Rais menerima demokrasi karena tiga alasan: Salah satunya karena Al-quran memerintahkan umat Islam untuk berpikir dua kali dalam menyelesaikan masalah. Kedua, para nabi secara historis menggunakan konsultasi ini dengan umat Islam untuk memecahkan masalah mereka. Dan ketiga, wajar bila umat Islam diperintahkan untuk memecahkan dilema dan masalah mereka, itu menunjukkan bahwa sistem demokrasi adalah bentuk sistem politik terbaik dalam sejarah manusia. Selain itu, Dawam Rahardjo tidak terlalu mempersoalkan aspek normatif hubungan Islam dan demokrasi. Baginya, demokrasi adalah konsep terbuka yang universal sifatnya, dan karena itu, tidak perlu dikaitkan dengan klaim idealis. Ia lebih tertarik menekankan pada implementasi dan praktik demokrasi, khususnya di Indonesia. Menurutnya, demokrasi sejati tidak hanya mencakup ranah politik tetapi juga kehidupan ekonomi. Namun demokrasi di bidang



ekonomi sulit atau tidak mungkin tercapai tanpa kondisi demokrasi politik, dan sebaliknya, adanya demokrasi di bidang ekonomi akan sangat membantu terselenggaranya demokrasi politik.

Bertentangan dengan pendapat para pemikir di atas, Irfan S. Awwas, Ja`far Umar Thalib dan Habib Rizieq menentang demokrasi. Menurut mereka, demokrasi adalah sistem yang paling buruk dan paling buruk, dan istilah demokrasi itu sendiri tidak ada dalam Islam. Dalam demokrasi, kebenaran dan kekuasaan ada di tangan rakyat, dan dalam Islam, kebenaran dan kekuasaan tertinggi ada di tangan Tuhan. Apalagi kemunculan demokrasi dan Islam secara historis berbeda. Demokrasi lahir dari zaman Aristoteles, dan Islam lahir dari Nabi Adam AS. Oleh karena itu, demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hubungan Islam dan demokrasi dapat dibicarakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Pada tataran normatif, mereka mempertanyakan nilai demokrasi ditinjau dari ajaran Islam. Pada tataran empiris, mereka menganalisis implementasi demokrasi dalam praktik politik dan administrasi negara. Selain itu, beberapa pandangan pada gambar di atas menunjukkan bahwa intelektual Islam Indonesia yang berpikiran terbuka umumnya menganut sistem demokrasi, meskipun jelas berbeda. Ada yang menerima dengan syarat, seperti Mohammad Nazir dan Amin Rice, ada pula yang menerima secara utuh, seperti Nurkolish Majid, Munawiel Shazari, dan Dawam Raharjo. Penolakan mereka terhadap demokrasi tidak mengherankan karena mereka berasal dari kelompok Islam yang tidak kenal kompromi. Karena pandangan mereka tentang kitab suci berbeda dengan pandangan para ilmuwan akademis lainnya.

Dari semua jawaban di atas, beberapa di antaranya mungkin masih ada, kecuali Nurcholish Majid, Munawir Sjadzali, dan Dawam Rahardjo, yang masih membahas antara kekuasaan mutlak Tuhan dan relativitas manusia. Namun, secara teologi Syura dipersepsikan sebagai konsep yang memiliki makna dan nilai demokrasi.

4. Nalar Politik dan Keyakinan Politik

Pemimpin masa depan harus menyadari bahwa persaingan untuk status prestise dapat mengarah pada kemenangan atau kekalahan. Jadi, memiliki rasa percaya diri (batin) yang diimbangi dengan strategi yang ulet (rasionalitas) akan mengantarkan pada pencapaian yang gemilang (kemenangan). Jika Anda menang, Anda akan menghargai pekerjaan dan pencapaian nyata Anda di depan bawahan/orang-orang Anda. Ketika Anda kalah, Anda menerima kenyataan (legowo). Melarikan diri dari dukun adalah tanda bahwa umat manusia masih didominasi oleh kerusakan batin dan kebodohan penalaran. Praktik shamanisme yang brilian menunjukkan bahwa konstruksi spiritual setiap individu membutuhkan suntikan tambahan untuk menempati posisi



keseimbangan pemikiran dan potensi rasional. Timbangan adalah obat mujarab melawan fanatisme akal dan kepercayaan pada kebodohan yang tak terlihat. Percaya bahwa manusia memiliki kehadiran supernatural (selain Tuhan) tidak memisahkan ruang dan waktu, karena kehadirannya selalu ada di mana dan kapan manusia berada. Hal gaib tersebut eksistensinya untuk diyakini manusia dan tidak untuk ‘menghamba’ padanya. Peran perdukunan ternyata tidak hanya bagi para kandidat politik, tetapi juga bagi kepentingan perorangan untuk taruhan sebagai penghasilan atau hobi.

5. Arah Politik dalam Islam

Politik dalam perspektif Islam mengandung makna keinginan atau cara muslim menjadikan ajaran Islam sebagai kurikulum kehidupan. Hal ini tercermin dalam semua aktivitas kehidupan. Bukan berarti bangsa harus berlandaskan Al-Qur'an, tetapi nilai-nilai Al-Qur'an diwujudkan dalam kehidupan karena nilai-nilai Al-Qur'an bersifat universal. Politik Islam bertujuan untuk mengangkat harkat, martabat, dan martabat manusia ke arah yang lebih berkualitas dan beradab sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi, serta menyebarkan rahmat, kedamaian, dan keamanan bagi alam semesta. Jika pelakunya bermoral, bermoral, beradab, dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan sesama, maka Islam politik terpenuhi.

Pertanyaan muncul, apakah Islam mengenal konsep politik? Ada tiga pendapat. Pertama, Islam memahami politik, bahkan mengatur politik sehingga Islam memiliki visi politik yang diwujudkan melalui konsep integrasi agama dan negara. *Ikhwan al-Muslimin* di Mesir, *Hizb al-Tahrir* di Lebanon, Jamaat Islami di Pakistan, Masyumi di Indonesia pada 1950-an, semuanya mengikuti jalan ini, PKS memiliki hubungan dengan *Ikhwan* dan *Hizb al-Tahrir Indonesia* (HTI) yang berbasis di Lebanon. Kedua, Islam tidak mengakui politik posisinya sebagai visi gerakan. Baik Al-Qur'an maupun Sunnah berbicara tentang politik, keberadaannya sebagai visi sebuah gerakan, dan politik Islam sebagai realitas yang terpisah. Gagasan ini dikemukakan oleh Ali Abdul Razik dari Mesir dalam makalahnya “*al-Islam wa Usul al-Hukm*” (Islam dan Prinsip Pemerintahan). Konteks Indonesia, didukung oleh Paramadina dan Ilmuwan Muda NU. Ketiga, mengambil jalan tengah, tidak mengingkari politik, dan tidak melebih-lebihkan sikap Islam terhadap politik. Pandangan ini dipromosikan oleh sejarawan Mesir Husain Haikal.

Islam mencakup ajaran yang diturunkan dari wahyu/tauhid/teologi, dengan aturan-aturan dalam ritual (ibadah), dan tata kehidupan manusia meliputi aspek moral, sosial dan agama. dan budaya. Dalam konteks negara-bangsa, liputan ini menghasilkan tiga perspektif, *theo-centries*, *antropho-centries*, dan *theo-antropho-centries*. *Theo-centries*; negara hanya menjalankan semua ajaran agama dan karenanya tidak berhak menentukan nilai-nilai yang dijadikan landasan bagi



kehidupan bersama. *Antropho-centries*; negara berhak menentukan sistem nilai yang melandasi kehidupan kolektifnya. *Theo-antropho-centries*; negara berhak menentukan nilai-nilai yang melandasi kehidupan berbangsa dan bernegara, meskipun tetap mempertahankan wibawa ajaran agama. Dari ketiga perspektif tersebut, berbagai jenis, sistem, dan bentuk negara yang dianut oleh berbagai suku bangsa secara garis besar dapat dibagi menjadi negara agama dan negara sekuler. Dalam konteks Indonesia, para founding fathers negara cenderung menggunakan pandangan *theo-antropho-centries* yang mengakomodir prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai agama serta nilai-nilai budaya.

6. Hubungan Negara dengan Agama

Hubungan antara negara dan agama dikenal dengan istilah negara teokratis (negara beragama) dan negara sekuler (negara yang tidak memaksa warganya untuk beragama). Apa yang Anda sebut negara yang tidak teokratis atau sekuler? Lantas bagaimana jika ada ormas yang menegaskan ingin menerapkan syariat Islam secara non-teokrasi? Seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), gerakannya secara terbuka mendirikan kekhalifahan Islam. Bahkan, pada Jumat 7 November 2014, ratusan warga HTI DPD II Solo Raya berdemonstrasi di bundaran Gladak Solo menentang rencana Presiden Jokowi menaikkan harga BBM. Alasan HTI adalah kenaikan harga BBM telah merugikan masyarakat, mempertanyakan fakta bahwa kenaikan harga BBM akan menghemat anggaran negara sebesar Rp 100 triliun. DPD II Kabupaten Blora menggelar aksi serupa di depan kantor bupati di Blora, Jawa Tengah pada Jumat, 14 November 2014.

Kata teokrasi berasal dari bahasa Yunani theokratia. Theos artinya Tuhan dan kratein artinya memerintah. Dengan demikian, teokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip agama (Ketuhanan). Ada ilmuwan Islam yang mendukung dan menentang hubungan negara-negara. Ilmuwan yang mendukung negara dengan agama adalah Abu al-A'la al-Maududi, Sayyid Qutub, Hasan al-Banna, Abdul al-Wahab dan Yusuf Qaradlawi. Adapun ilmuwan yang tidak setuju apakah ada ketegangan hubungan antara negara dan agama, yaitu Mutafa Kemal Pasha dari Turki, Sir Sayyid Ahmad Khan, Nawwab Abdul al-Lathif, Mustafa Khan, Khuda Bakhsh, Qasim Amin, Ali Abdurraziq dan Hassan Hanafi.

Dalam catatan sejarah, hubungan negara dengan agama sangat erat. Di Mesir kuno, Raja Firaun memproklamkan Tuhan agar pemimpin bangsa berada dalam bayang-bayang Tuhan. Bahkan, Ramses II membuat piramida di Mesir dari tanah liat (bata) yang dibakar, terutama di bagian atas piramida sebagai alasan Firaun untuk melihat Tuhan. Pesan dari al-Qashash: 38 "Firaun berkata: Wahai para pemimpin umatku, aku hanya tahu Tuhanmu. Wahai Hamam, buatlah batu bata dan bangunlah karya-karya besar agar aku bisa naik dan bertemu dengan Tuhan



Musa si pendusta.” Pada abad ke-4, Kekaisaran Romawi menjalin hubungan yang harmonis antara agama dan negara, dengan raja selalu didampingi oleh seorang pendeta. Constantine the Great (305-337M) menjadikan Byzantium sebagai ibu kota Romawi dan Katolik sebagai agama negara. Peran pendeta bahkan lebih jauh, bahkan untuk penulis korup, karena Paus Leo X telah terbukti menerima suap sebesar US\$5 juta per tahun untuk menjual kantor di Gereja Katolik. Ada juga yang menjual emas untuk penebusan dosa. Perilaku negatif ini berlanjut hingga abad ke-14, sehingga mereka yang terkekang dikenal sebagai Abad Kegelapan. Martin Luther dan John Calvin mencatat arogansi ulama dalam pemerintahan, serta hukuman yang dijatuhkan oleh para ilmuwan yang kritis terhadap pemerintah.

Publik mendukung pembebasan ulama dari pemerintah. Pada abad ke-11 M, muncul gerakan protes dan protes sosial terhadap dominasi dan eksploitasi gereja. Pengusaha kaya Prancis Peter Waldensons berkampanye untuk warga melawan arogansi gereja. Pada 1073, meletuslah peristiwa Pembaruan Hildebrandine melawan dominasi gereja. Gerakan protes rakyat dari abad ke-15 hingga ke-16 meruncing kuat dengan munculnya gagasan sekularisme. Kekuasaan gereja dalam pemerintahan semakin berkurang dan kekuasaan pemerintahan dikuasai oleh otokrasi tanpa peran agamawan. Raja Henry VIII dari Inggris pada abad ke-16 mengambil alih kekuasaan dari paus. Di era Raja Elizabeth I, Inggris mendeklarasikan Gereja Protestan sebagai gereja resmi negara langsung di bawah keluarga kerajaan, Gereja bukan lagi badan pengatur kebijakan negara. Hal ini diikuti oleh Swedia pada abad ke-16, yang memutuskan untuk menjadi negara sekuler dan agama Evangelis sebagai agama negara. Amerika memberi warganya kebebasan beragama atau tidak, tidak ada gereja negara resmi. Setelah Revolusi Perancis, negara netral terhadap agama (*laicite*).

Pemisahan agama dengan negara di Eropa pada abad ke-11 M dipicu oleh ketidakpuasan rakyat terhadap ulah oknum agamawan yang dekat dengan penguasa, hingga munculnya paham sekularisme yang kian marak ketika Harvey Cox menulis buku *The Secular City*. Menurut Cox, sekularisasi merupakan akibat logis dari dampak kepercayaan Bibel terhadap sejarah. Negara yang mendeklarasikan sebagai negara sekuler yakni Amerika Serikat, Italia, Perancis, Estonia, Georgia, Spanyol, Rusia, Portugal, Ukraina, Turki, Portugal, Albania, Meksiko, Australia, Selandia Baru, Brasil, Kolombia, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Adapun negara eks-sekuler yakni Bangladesh, Iran, Irak, dan Madagaskar. Sementara negara yang dianggap tidak sekuler juga tidak negara agama yakni Indonesia, Jerman, Israel, Argentina, Libanon, Malaysia, Myanmar, Srilanka, Inggris, dan Thailand. Karena sepak terjang sekuler yang dianggap membahayakan akidah umat, MUI pada 2005 memfatwa sekularisme bertentangan dengan ajaran Islam karena itu haram dianut oleh muslim. Sekularisme adalah memisahkan urusan dunia dari



agama dan hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan. Adapun hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial. Agama dan negara menyatu sejak era Nabi saw yang diteruskan oleh Khulafa Rasyidun hingga Dinasti Ottoman yang runtuh pada tahun 1924.

Munculnya pemisahan agama dengan negara dalam Islam setelah kolonisasi negara Islam oleh Barat. Islam dijadikan sebagai agama negara sebagaimana di Arab Saudi, Suriah, Irak, Mesir, Libya, Sudan, dan Aljazair. Iran semula dipimpin oleh Dinasti Qajar, yakni muslim Syiah. Gerakan rakyat memunculkan Dinasti Pahlevi yang bernuansa sekuler. Pada 1979 gerakan rakyat menggulingkan Syah. Menurut Raphael Kiohier, Guru Besar Sosiologi Sekolah Tinggi Ilmu Politik d'Aix di Aix en Provence Perancis, tidak ada satu negara pun yang benar-benar penuh dalam mengaplikasikan prinsip sekularisme. Bila ingin memisahkan antara hubungan negara dengan agama, negara tersebut akan memiliki badan tersendiri yang akan melayani agama bagi warga negaranya.⁹

Sekularisme dari bahasa Latin *saeculum* berarti masa kini dan tempat (ruang), merujuk waktu yang terjadi kini dan ruang yang berarti dunia. Jadi, sekularisme adalah menyandarkan pada hal-hal yang terjadi saat ini dan hanya di dunia. Makna lainnya adalah gerakan yang condong pada duniawi dan tanpa adanya campur tangan agama. Sayyid Qutub menyatakan bahwa sekularisasi bertentangan dengan Islam. Realitasnya, negara yang mengaku sekuler, tatkala melantik presidennya tetap disumpah dengan kitab sucinya, sebagaimana di Amerika Serikat. Menyikapi hal ini, pesan Q.S. al-Baqarah [2]: 208 “Wahai orang yang beriman, masuklah kamu semua dalam Islam secara kaffah”. Bahwa kesempurnaan hidup bila memahami Islam secara utuh. Maknanya, tak ada pemisahan antara dunia dengan akhirat.

D. DAFTAR RUJUKAN

- Jalaluddin Rahmat, “Islam dan Demokrasi”, dalam Magnis Suseno, dkk., Agama dan Demokrasi, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1992), hal. 40
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 1990), hal. 172
- M. Syafi’I Anwar, Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia, (Jakarta: Paramadina, 1995), hal 226



- Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, (Jakarta: Teraju, 2002), hal. 132-136
- Fikri, M. Sirajudin, and Abdur Razzaq. "Konsep Demokrasi Islam Dalam Pandangan Kuntowijoyo (Studi Pada Sejarah Peradaban Islam)." *Wardah* 16.1 (2015): 95-104.
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Marwan Ja'far, "Islam dan Nilai Kebangsaan." dalam *Republika*, 23 Agustus 2013, hlm. 6.
- Hafidhuddin, Didin, "Politisi Bermoral", *Republika*, 24 Januari 2004.
- Kurnia, Abdi D, "Politik Islam", *Republika*, 21 Mei 2010.
- Effendi, Bahtiar. "Demokrasi dan Agama: Eksistensi Agama dalam Politik" dalam M. Deden Ridwan dan Asep Gunawan. *Demokratisasi Kekuasaan*. Jakarta: LSAF-TAF, 1997.
- M. Amin, Rais. *Demokrasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1996.